

## Analysis of role institutional Hambalang Village in tourism development through community empowerment

### Analisis peran kelembagaan Desa Hambalang dalam upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat

Yustisia Pasfatima Mbulu\*, Fetty Nurmala Rossi, Yosi Erfinda, Aqilla Devia Salsabila  
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Jakarta 12640, Indonesia

---

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

community empowerment; tourist village; village institutions

**Katakunci:**

desa wisata; kelembagaan desa; pemberdayaan masyarakat

**DOI:**

<https://doi.org/10.26905/jpp.v8i1.8468>

**Corresponding Author:**

Yustisia Pasfatima Mbulu  
[yustisia.pm@univpancasila.ac.id](mailto:yustisia.pm@univpancasila.ac.id)

#### ABSTRACT

*The development of a tourist village is influenced by institutional aspects, tourist attractions and infrastructure. One important component in the success of tourism is an institution. The purpose of this study is to analyze the institutional role of Hambalang Village to empower the community in providing homestays, developing UMKM, culinary tourism, religious tourism, and sports tourism. This research method using qualitative methods with a descriptive approach. This research data collection method through observation, interviews, and literature study. The data sources in this study were obtained from Focus Group Discussion (FGD) activities obtained from Hambalang Village institutions which included the Village Government, BUMDes, LPM, and BPD. The results of the analysis show that there is an institutional role in Hambalang Village in the development of UMKM, culinary tourism, religious tourism, and sport tourism. However, it cannot be ruled out that there is no institutional role for Hambalang Village in providing homestays. Efforts to develop tourism through community empowerment in Hambalang Village in the development of UMKM and religious tourism that play a major role are the Village Government and BPD. Meanwhile BUMDes and LPM focus on culinary tourism. While community empowerment for sport tourism is mostly carried out by the Village Government.*

#### HOW TO CITE ITEM

Mbulu, Y., Rossi, F., Erfinda, Y., & Salsabila, A. (2023). Analysis of role institutional Hambalang Village in tourism development through community empowerment. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 8(1).  
doi:<https://doi.org/10.26905/jpp.v8i1.8468>

#### ABSTRAK

Pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, daya tarik wisata, dan infrastruktur. Salah satu komponen penting dalam keberhasilan pariwisata adalah suatu kelembagaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kelembagaan Desa Hambalang untuk memberdayakan masyarakat dalam penyediaan *homestay*, pengembangan UMKM, wisata kuliner, wisata religi, dan *sport tourism*. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diperoleh dari kelembagaan Desa Hambalang yang meliputi Pemerintah Desa, BUMDes, LPM, dan BPD. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya bentuk peran kelembagaan Desa Hambalang dalam pengembangan UMKM, wisata kuliner, wisata religi, dan *sport tourism*. Tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa belum adanya peran kelembagaan Desa Hambalang dalam penyediaan *homestay*. Upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di Desa

Hambalang dalam pengembangan UMKM dan wisata religi yang berperan besar adalah Pemerintah Desa dan BPD. Sedangkan BUMDes dan LPM berfokus dalam wisata kuliner. Sementara pemberdayaan masyarakat untuk *sport tourism* sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah Desa.

---

## PENDAHULUAN

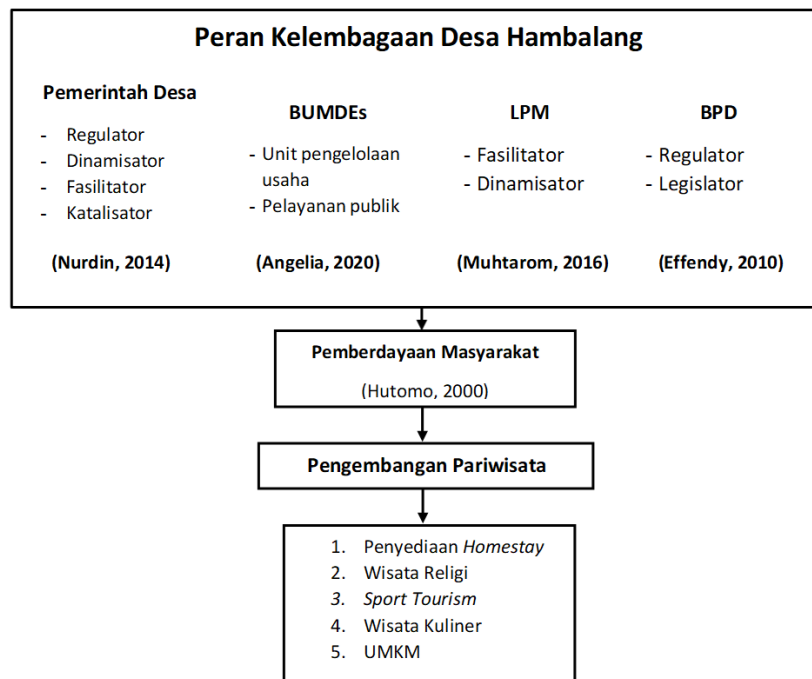
Industri pariwisata terdampak besar dari pandemi Covid-19, tetapi munculnya berbagai destinasi wisata baru seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 memberikan dampak positif bagi industri pariwisata sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Septemuryantoro (2021) bahwa destinasi wisata yang berkaitan dengan alam dan kehidupan masyarakat pedesaan menjadi salah satu alternatif yang menjadi pilihan bagi wisatawan saat pandemi. Kecenderungan masyarakat untuk berwisata kembali ke alam sekaligus ke area terbuka menjadi tren pariwisata baru. Salah satu potensi wisata yang dijadikan sebagai alternatif wisata adalah desa wisata. Saat ini pemerintah sedang fokus menumbuhkan ribuan desa wisata di seluruh Indonesia. Desa Wisata di Indonesia menjadi andalan destinasi wisata sebagai penggerak ekonomi pariwisata dan ekonomi masyarakat khususnya pedesaan. Berdasarkan data Jejaring Desa Wisata (Jadesta.com), tercatat ada 4.008 desa wisata yang tersebar di Indonesia dan terus meningkat seiring dengan program pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, daya tarik wisata, dan infrastruktur (Sastrayuda, 2010). Salah satu komponen penting dalam keberhasilan pariwisata adalah suatu kelembagaan yang ada di desa wisata. Menurut Cooper (2005), kelembagaan (*ancillary*) adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan wisata. Desa Hambalang menjadi desa wisata rintisan di Kabupaten Bogor memiliki potensi wisata alam dan religi. Desa Hambalang telah ditetapkan menjadi desa wisata melalui SK yang dikeluarkan oleh kepala desa. Pengembangan potensi kepariwisataan di Desa Hambalang berbasis alam dan religi yang menggali keanekaragaman, kekhasan dan keunikan membuat desa ini layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Syafi'i dan Suwandono (2015) merekomendasikan terkait pembentukan desa wisata diperlukannya komitmen dari pemerintah desa dan sinergi dengan kelembagaan didalam pengembangan desa untuk menjadi desa wisata baik dari segi koordinasi dan penyusunan rencana yang tepat serta kesiapan masyarakat dalam membangun desa wisata. Meskipun Desa Hambalang belum memiliki kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), terdapat beberapa kelembagaan yang telah dibentuk dan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan tersebut yaitu Pemerintah Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hingga saat ini permasalahan yang terjadi di Desa Hambalang yaitu belum mampunya masyarakat dalam mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal sehingga belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dari adanya kegiatan pariwisata di Desa Hambalang. Selain itu, masyarakat masih bingung terhadap langkah-langkah apa saja yang perlu dilaksanakan dalam keterlibatannya sebagai pelaku pariwisata di Desa Hambalang. Oleh karena itu peran kelembagaan di Desa Hambalang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat yang nantinya dapat bermanfaat dalam mengembangkan produk desa wisata diantaranya penyediaan *homestay*, wisata religi, wisata kuliner, UMKM, dan *sport tourism*. Kelima produk wisata tersebut merupakan fokus dari rangkaian kegiatan Riset Keilmuan Tahun 2021 dengan skema riset desa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi seperti yang dapat dilihat pada gambar 1. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kelembagaan Desa Hambalang melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata di Desa Hambalang.

## METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana peran tiap lembaga Desa Hambalang dalam memberdayakan masyarakat yang nantinya dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat mengembangkan pariwisata di Desa Hambalang. Penelitian ini berlokasi di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer melalui observasi dan wawancara dengan Pemerintah Desa Hambalang, Kepengurusan BUMDes, LPM, dan BPD, Ketua Desa wisata, pelaku UMKM, dan masyarakat Desa Hambalang. Penelitian ini juga melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Camat Citeureup, Kepala Desa Hambalang, Sekretaris Desa Hambalang, Ketua MUI Desa Hambalang, Karang Taruna Desa Hambalang, Kepala Dusun Hambalang, dan pelaku wisata Desa Hambalang. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan website.



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelembagaan Desa Hambalang

Desa Hambalang sebagai desa wisata tidak terlepas dari peran kelembagaan desa yang bersinergi dalam membangun kemajuan desanya dengan segala potensi wisata yang ada. Hal ini seperti yang dikutip pernyataan Firmansyah (2012) menyebutkan bahwa Pokdarwis berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator tersebut agar kesiapan dan kepedulian masyarakat sekitar desa wisata lebih meningkat dan lebih sadar akan peluang-peluang yang bisa muncul kapan saja. Meskipun Desa Hambalang sudah ditetapkan menjadi desa wisata, namun hingga saat ini Desa Hambalang belum memiliki lembaga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dapat menggerakkan masyarakatnya untuk dapat mengembangkan potensi wisata lebih dalam. Dalam pengembangannya, tidak terlepas dari kelembagaan desa, yang diantaranya adalah:

1. Pemerintah Desa. Arif dalam Nurdin (2014) mengatakan peranan pemerintah desa diantaranya yaitu sebagai fasilitator atau menciptakan kondisi yang kondusif dengan mengoptimalkan penyediaan fasilitas pembangunan desa sebagai dinamisator atau penggerak bagi masyarakat, dan sebagai regulator atau penyusun kebijakan. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang, pemerintah Desa telah berperan sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana prasarana dan pemberian modal bagi masyarakat. Untuk perannya sebagai regulator Pemerintah Desa berperan dalam menyusun regulasi mengenai aturan jam malam kepada para pelaku pariwisata di Desa Hambalang. Sementara itu peran sebagai dinamisator dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang.
2. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). Peranan BUMDes yaitu dengan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Angelia, 2020). Peran BUMDes Hambalang dalam mengembangkan pariwisata yaitu dengan mengelola tiket masuk wisata Taman Fathan Hambalang. Dengan dikelolanya tiket masuk wisata Taman Fathan oleh BUMDes, dana tersebut digunakan untuk pemasukan desa. Sebagian pengurus BUMDes pun terlibat dalam pengelolaan Taman Fathan Hambalang untuk keamanan dan kebersihan agar tetap menjaga lingkungan desa sehingga lingkungan Desa Hambalang tetap terjaga kebersihannya dalam menjalankan kegiatan wisata.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Menurut Muhtarom (2016), LPM memiliki peran sebagai fasilitator dan dinamisator. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang, LPM berperan sebagai fasilitator untuk memperbaiki aksesibilitas jalan desa. Cooper (2005) menyatakan bahwa aksesibilitas mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk

menuju destinasi wisata. Berdasarkan teori Cooper tersebut, LPM telah menyediakan akses jalan desa yang dapat menjangkau wisatawan menuju Desa Hambalang.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Effendy (2010) dalam Asrizal (2020) mengemukakan BPD berperan dalam menyalurkan serta menampung aspirasi masyarakat (legislator) dan penyusun kebijakan (regulator). Dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang, BPD berperan sebagai regulator dalam menyusun kebijakan terkait aturan jam malam di Desa Hambalang bagi para pelaku usaha pariwisata. Selain sebagai penyusun kebijakan, BPD menyelenggarakan forum musyawarah wilayah (muswil) yang diadakan 6 bulan sekali sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat.

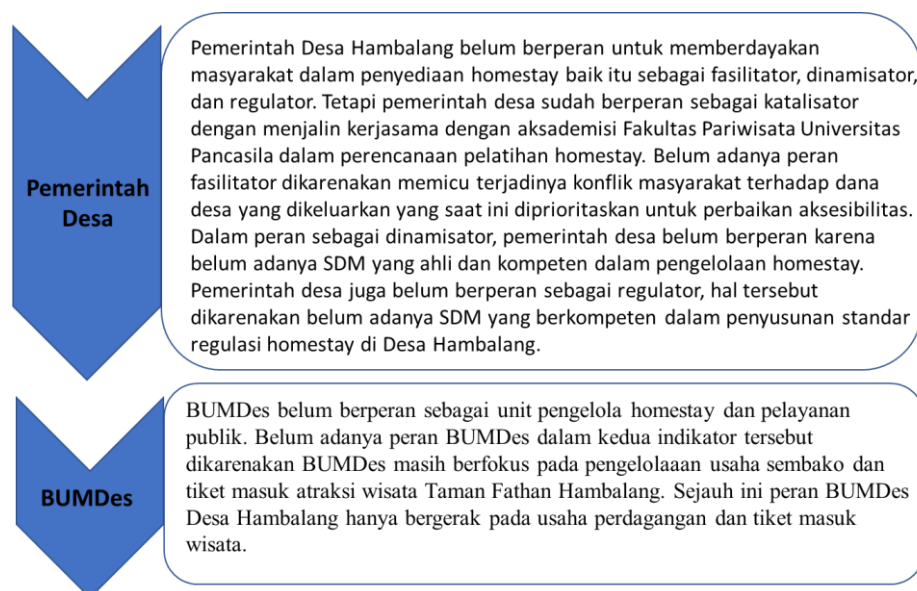
### **Peran Kelembagaan Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Penyediaan Homestay sebagai Pengembangan Pariwisata**

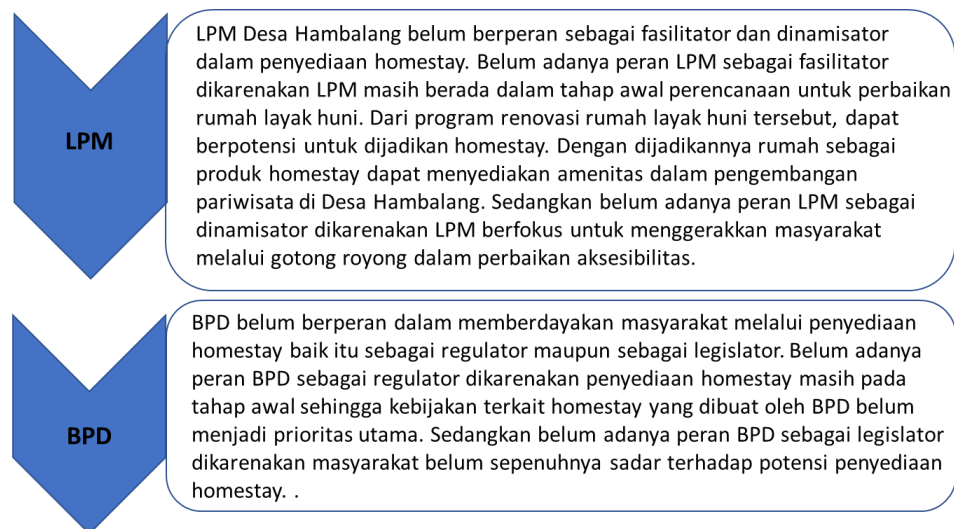
*Homestay/* pondok wisata adalah rumah tinggal milik pribadi yang sebagian disewakan sebagai tempat penginapan bagi wisatawan dengan pembayaran harian, pemilik dan wisatawan tinggal bersama (Mahadewi, 2018). *Homestay* mengambil peran yang begitu esensial bagi pemberdayaan masyarakat (Yonk, 2010). Penyediaan *homestay* dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang belum begitu digiatkan oleh para aktor yang berperan untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan analisis peneliti dengan teori Damanik (2014), dilihat pada komponen produk *homestay* di Desa Hambalang ditandai dengan sudah adanya rumah masyarakat yang dapat dijadikan *homestay*. Selain produk, sudah adanya pelaku yang menjadi tuan rumah dalam melayani wisatawan saat menginap di *homestay*. Kelembagaan pun merupakan komponen penting dalam penyediaan *homestay*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Acep Martin selaku Ketua Desa Wisata Desa Hambalang mengatakan,

*“Kita lihat masyarakatnya saja sebetulnya belum siap terhadap standar pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah tersebut untuk dijadikan homestay. Salah satu yang menjadi kendala dalam penyediaan homestay yaitu stigma negatif terhadap kedatangan wisatawan yang menginap akan memicu terjadinya perzinahan, jadi untuk peran dari lembaga pun belum ada.”*

Pernyataan hasil wawancara dan observasi tersebut dirangkum pada Gambar 2.





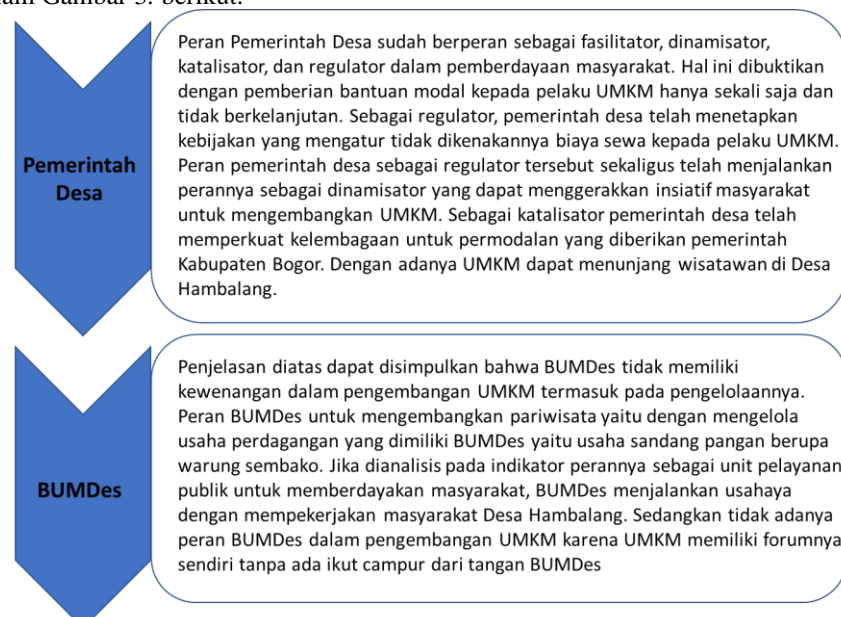
**Gambar 2.** Peran Kelembagaan Desa Hambalang Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Penyediaan *Homestay*

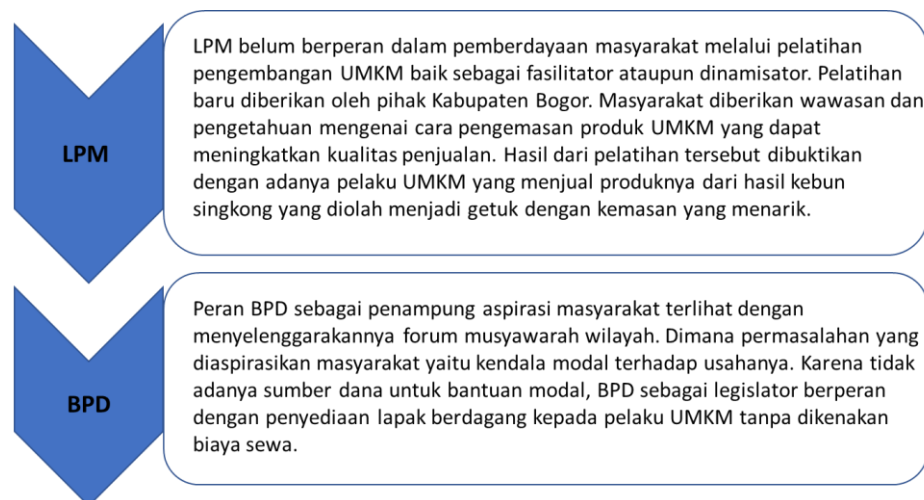
### Peran Kelembagaan Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Pengembangan UMKM sebagai Pengembangan Pariwisata

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai fasilitas penunjang yang dapat menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan berperan dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang. Berdasarkan analisis peneliti yang menggunakan teori Prasetyo (2018) dengan observasi di lapangan menghasilkan bahwa pengembangan pariwisata dan perkembangan UMKM erat kaitannya dengan peningkatan permintaan wisatawan terhadap kebutuhan selama berwisata di Desa Hambalang. Hal tersebut dikarenakan atraksi wisata yang menarik berupa panorama alam perbukitan serta sarana prasarana yang baik membuat wisatawan ingin berkunjung kembali. Selain itu Desa Hambalang memiliki akses yang mudah dijangkau dan masyarakat desa yang memiliki UMKM mampu menyambut dengan keramahmatan. Pengembangan UMKM tidak terlepas dari adanya peran Pemerintah Desa seperti yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Wawang Sudarwan selaku Ketua Desa Hambalang yang mengatakan:

*“Waktu itu kita pernah diberikan bantuan modal satu juta rupiah tapi itu pun cuma sekali saja. Selebihnya tidak ada bantuan lagi”.*

Pelaku UMKM belum sepenuhnya diberdayakan dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, peran dari para aktor kelembagaan desa disimpulkan dalam Gambar 3. berikut:





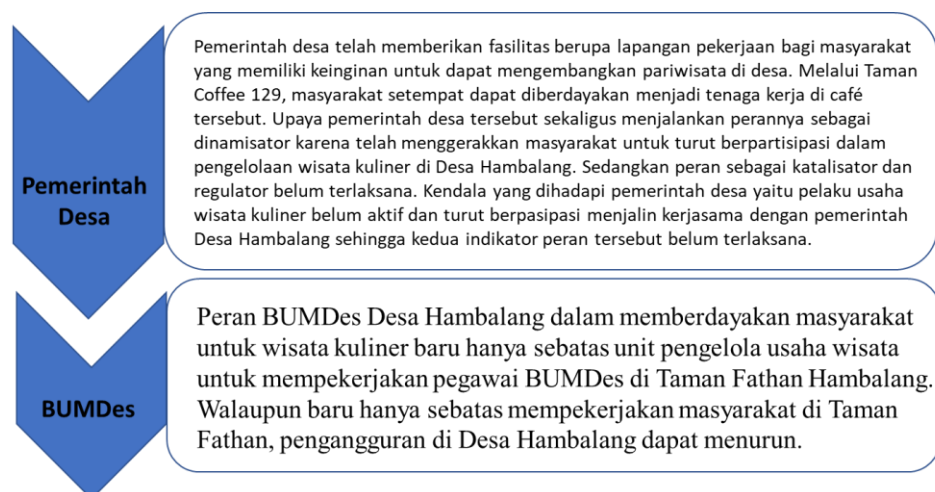
**Gambar 3.** Peran Kelembagaan Desa Hambalang Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Pengembangan UMKM

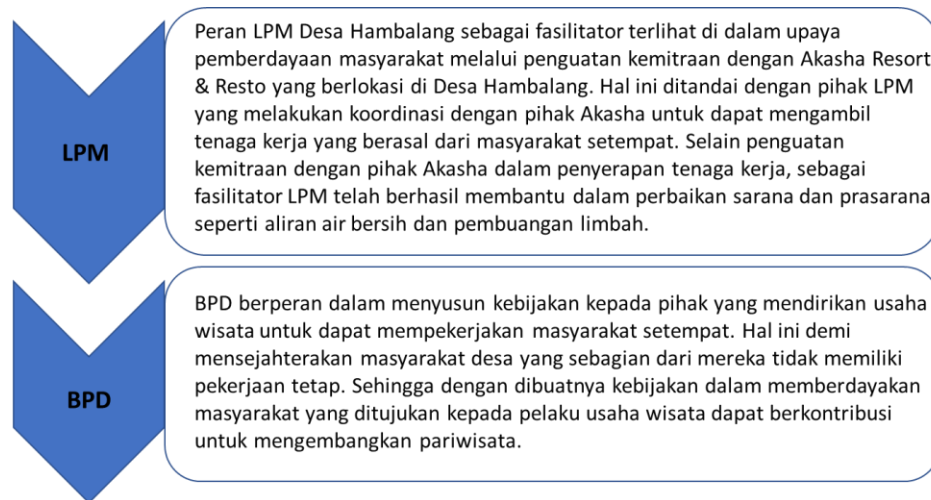
### Peran Kelembagaan Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Wisata Kuliner sebagai Pengembangan Pariwisata

Daya tarik utama wisata kuliner adalah produk makanan. Wisata kuliner menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan (Suryadana, 2009). Desa Hambalang memiliki beragam wisata kuliner mulai dari makanan tradisional hingga makanan yang kekinian. Produk wisata kuliner di Desa Hambalang dikembangkan berupa rumah makan dan café dengan panorama alam perbukitan. Tidak sedikit dari wisatawan yang mengunjungi Desa Hambalang untuk merelaksasi diri dengan mencicipi makanan sambil menikmati panorama alam perbukitan. Dengan keberadaannya café dan restoran yang berada di Desa Hambalang membuat wisata kuliner menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam pengembangan pariwisata di Desa Hambalang. Seiring dengan berkembangnya wisata kuliner di Desa Hambalang, keterlibatan masyarakat dalam pengembangannya perlu diberdayakan. Dalam hal ini, BUMDes telah berperan untuk memberdayakan masyarakat seperti yang dikatakan pengurus BUMDes Hambalang:

*“BUMDes memberdayakan masyarakat untuk wisata kuliner yaitu dengan merekrut SDM warga asli Hambalang. BUMDes juga mengelola tiket masuk wisata kuliner Taman Fathan Hambalang. Kami mengambil 10% di setiap satu tiket masuk Taman Fathan Hambalang untuk menggaji pegawai BUMDes yang bekerja sebagai petugas keamanan dan jaga tiket.”*

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, peran dari para aktor kelembagaan desa disimpulkan dalam gambar 4.





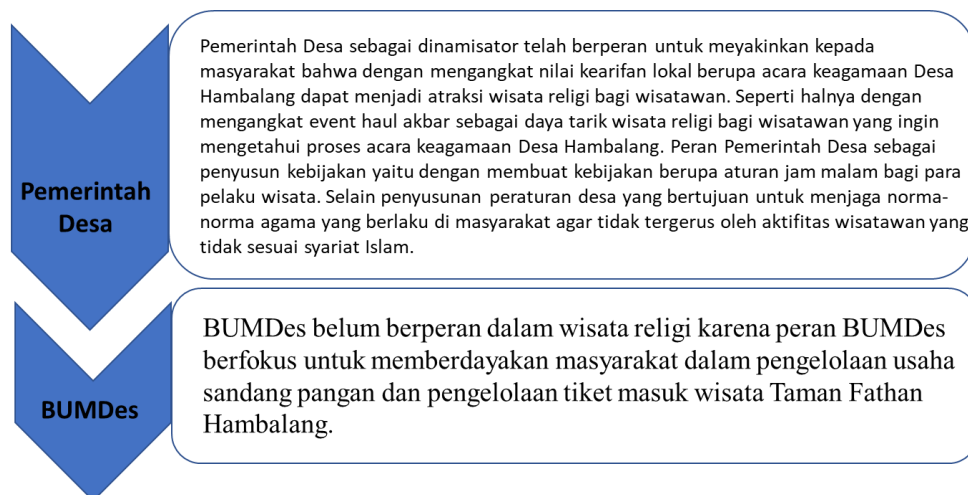
**Gambar 4.** Peran Kelembagaan Desa Hambalang Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Wisata Kuliner

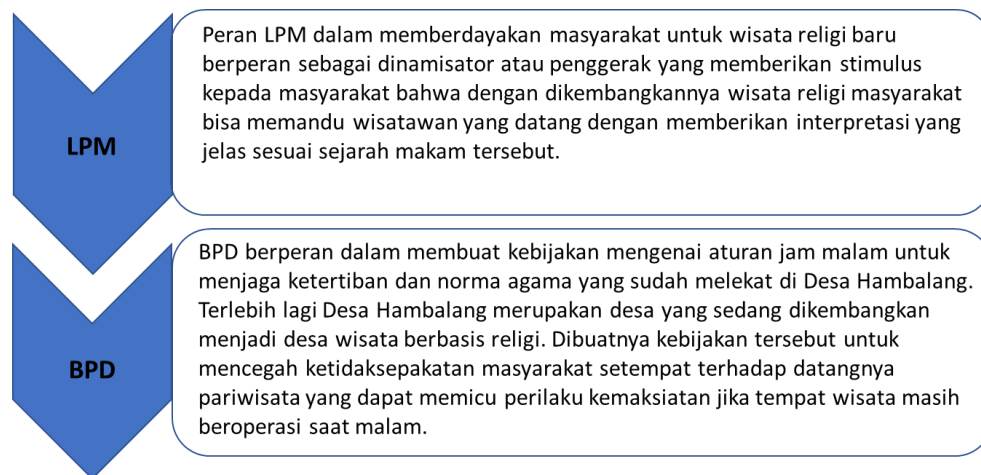
***Peran Kelembagaan Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Wisata Religi sebagai Pengembangan Pariwisata***

Marsono (2016) mendefinisikan wisata religi adalah salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan sisi religius atau keagamaan yang dianut oleh umat manusia. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama. Desa Hambalang dengan norma agama yang masih melekat pada kehidupan masyarakatnya, membuat peran kelembagaan desa untuk dapat membuat kebijakan agar tidak melunturkan norma agama tersebut seiring dengan berkembangnya pariwisata di desa mereka agar tidak melunturkan nilai-nilai agama yang sudah ada. Terdapat makam leluhur yang dijadikan sebagai tempat ziarah bagi sebagian kalangan tertentu. Keberadaan wisata religi di Desa Hambalang menciptakan peluang dalam mengembangkan pariwisata di Desa Hambalang sehingga perlu adanya peran kelembagaan desa dalam memberdayakan masyarakat untuk wisata religi. Dalam aspek ini, kelembagaan Desa Hambalang berperan dalam membuat aturan agar tidak melunturkan nilai agama yang sudah ada seperti yang dikatakan Ketua BPD Hambalang:

*“Waktu itu sebelum bulan puasa kita sudah mengadakan pertemuan dengan para pelaku wisata umum di Desa Hambalang. Pada saat itu sudah disepakati bersama mengenai jam operasional yaitu dengan diberikannya batas waktu buka pada pukul 9 malam.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa BPD berperan dalam membuat kebijakan mengenai aturan jam malam untuk menjaga ketertiban dan norma agama yang sudah ada. Berikut merupakan simpulan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap peran kelembagaan Desa Hambalang untuk memberdayakan masyarakat dalam wisata religi:





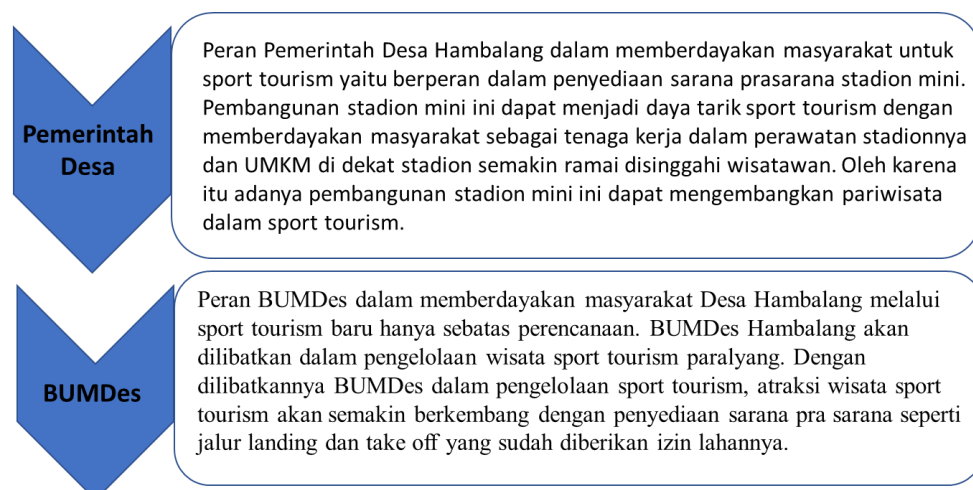
**Gambar 5.** Peran Kelembagaan Desa Hambalang Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Wisata Religi

### Peran Kelembagaan Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Sport Tourism sebagai Pengembangan Pariwisata

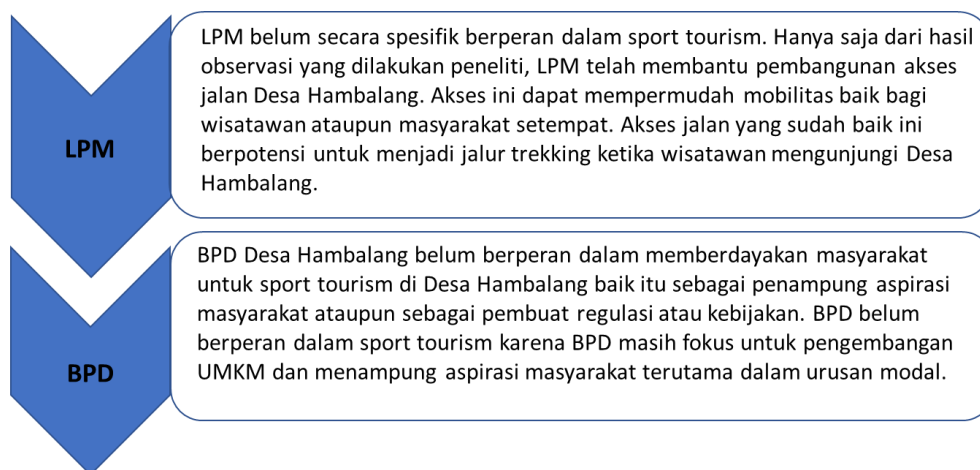
Standeven dan De Knop dalam Weed (2008) mendefinisikan *sport tourism* atau wisata olahraga adalah semua bentuk keterlibatan seseorang baik aktif maupun pasif dalam kegiatan olahraga, berpartisipasi sebagai peserta atau dengan cara yang terorganisir untuk alasan non komersial ataupun bisnis. Desa Hambalang dengan potensi *sport tourism* yang sedang dikembangkannya, telah menarik wisatawan yang berkunjung untuk bersepeda, trekking, dan paralayang. Seiring dengan berkembangnya *sport tourism* di Desa Hambalang, perlu adanya peran dari kelembagaan desa untuk bisa menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi didalamnya. Hal ini menjadi peluang yang baik untuk dapat mengembangkan pariwisata di Desa Hambalang dengan memberdayakan masyarakatnya dalam *sport tourism*. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Hambalang yang mengatakan:

*“Pemerintah desa sudah memperbaiki jalur trekking menggunakan dana desa. Hambalang juga punya stadion mini yang bisa dijadikan atraksi sport tourism. Tapi untuk saat ini masih belum dibuka untuk umum karena belum 100% selesai pembangunannya.”*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Hambalang, disimpulkan analisis peran kelembagaan Desa Hambalang dalam *sport tourism* seperti yang digambarkan pada bagan berikut:







**Gambar 6.** Peran Kelembagaan Desa Hambalang Desa Hambalang dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk *Sport Tourism*

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa semua kelembagaan di Desa Hambalang belum berperan secara maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk penyediaan *homestay*. Kendala yang dihadapi sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator yaitu karena SDM di Desa Hambalang belum memiliki keahlian dalam pengelolaan *homestay*. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap penyediaan jasa *homestay* yang dapat memicu terjadinya perzinahan. Mengingat Desa Hambalang memiliki norma agama yang masih melekat pada kehidupan masyarakatnya.

Upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Hambalang dalam pengembangan UMKM dan wisata religi yang berperan besar adalah Pemerintah Desa dan BPD. Pada sektor UMKM, Pemerintah Desa dan BPD memberikan kemudahan lapak berjualan dan bantuan modal yang disalurkan kepada masyarakat. Sementara itu LPM dan BUMDes masih berfokus pada bidangnya masing-masing untuk memberdayakan masyarakat. Sedangkan pada sektor wisata religi, Pemerintah Desa dan BPD membuat kebijakan terkait jam operasional kepada seluruh pelaku wisata dan wisatawan yang berada di Desa Hambalang. Jika BPD tidak berperan dalam membuat aturan jam malam, kesalahpahaman masyarakat akan membuat menolaknya aktifitas wisata di Desa Hambalang. Oleh karena kebijakan yang dibuat BPD, masyarakat bisa menerima masuknya pariwisata dalam Desa Hambalang.

Lembaga Desa Hambalang sudah aktif berperan dalam upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat pada wisata kuliner di Desa Hambalang dibuktikan dengan peran BUMDes dan LPM yang menggunakan SDM masyarakat setempat pada atraksi wisata kuliner di Desa Hambalang.

Upaya pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat pada *sport tourism* di Desa Hambalang sebagian besar dilakukan oleh peran Pemerintah Desa. Hal ini dibuktikan dengan perannya sebagai fasilitator dalam pembangunan stadion mini. Pembangunan tersebut melibatkan tenaga masyarakat setempat dan dampak dari adanya stadion mini dapat mengembangkan wisata olahraga di Desa Hambalang.

Selain itu, berikut ini beberapa saran yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

- Peran kelembagaan Desa Hambalang perlu dioptimalkan untuk memberikan pembinaan, sosialisasi dan pelatihan mengenai penyediaan *homestay* sesuai standarnya kepada masyarakat. Dengan memberikan wawasan seperti itu kekhawatiran dan stigma negatif masyarakat dapat berubah yang semula menjadi ancaman diubah menjadi peluang yang pengembangan pariwisata. Selain itu peran Pemerintah Desa sebagai regulator perlu menyusun aturan terhadap wisatawan yang akan menginap di *homestay* untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan.
- Untuk pengembangan pariwisata dalam pengembangan UMKM, perlu diberikan pelatihan dari para stakeholder untuk meningkatkan skill masyarakat. Dengan kemauan dan keterampilan jahit yang sudah dimiliki, masyarakat bisa memproduksi baju koko ataupun mukena. Mengingat potensi Desa Hambalang yang berbasis wisata religi dengan nilai-nilai agama yang masih melekat kenapa tidak jika masyarakatnya yang memiliki keterampilan menjahit dan sablon untuk memproduksi mukena, baju koko, dan alat shalat lainnya.
- Untuk upaya pengembangan pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat pada wisata kuliner, kelembagaan desa perlu mengembangkan makanan tradisional khas Desa Hambalang seperti hasil kebun yang diolah menjadi getuk singkong. Peran dari lembaga desa sangat dibutuhkan untuk menggerakkan masyarakat dan juga memberikan bantuan modal awal.
- Kelembagaan Desa Hambalang perlu mengadakan *event* rutin seperti lomba lari marathon ataupun sepeda untuk mengembangkan potensi *sport tourism* yang dimiliki Desa Hambalang. Dengan

mengadakan *event* seperti itu wisatawan akan semakin tertarik untuk datang mengunjungi Desa Hambalang sekaligus menikmati panorama alam perbukitan yang indah sambil berolahraga.

- Untuk peran kelembagaan desa untuk wisata religi dibutuhkan pengembangan yang optimal dan terarah sehingga keberadaan wisata religi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini merupakan Hibah program Riset Keilmuan Tahun 2021 dalam skema Riset Desa. maka peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Teknologi, serta LPDP yang sudah memberikan dana hibah tersebut. Peneliti juga ingin berterima kasih kepada Pemerintah Desa Hambalang Kabupaten Bogor yang menjadi mitra dalam penelitian ini sehingga keberadaan penelitian ini dapat terlaksana.

### DAFTAR RUJUKAN

- Angelia, Mitha. (2020). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan*. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara).
- Asrizal, Muhammad & Rafiq, Aunur. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 223-232.
- Cooper., Fletcher. (2005). *Tourism: Principles and Practice 3rd ed*. Pearson Education.
- Damanik. & Rahdriawan, (2014). *Homestay sebagai Usaha Pengembangan Desa Wisata Kandri*. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 1060-1071.
- Firmansyah, R. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Jadesta.com. (2022, Maret). *Jejaring Desa Wisata*. <https://jadesta.kememparekraf.go.id/peta>
- Mahadewi. (2018). *Homestay Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
- Marsono, Prihantoro, Irawan, Sari Y.K., Andayani. (2016). *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial-Budaya*. Gadjah Mada University Press.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Setia.
- Miles, M.,B., Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Rohidi, T, Penerjemah). UI Press.
- Muhtarom, A. (2016). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3).
- Nurdin, M. (2014). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).
- Prasetyo B, Suryoko S. (2018). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan UMKM Pada Kawasan Wisata Dieng. *Diponegoro Journal of Social And Politic*, 1-8.
- Sastrayuda, G., S. (2010). Konsep Pengembangan Desa Wisata Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And Leisure. <http://google.com/webph?hl=id&tab=mw#hl=id&scient=psy-ab&q>.
- Septemuryantoro, S., A. (2021). Potensi Desa Wisata sebagai Alternatif Destinasi Wisata New Normal. *Media Wisata*, 19(2):186–197.
- Suryadana. (2009). *Perkembangan Industri Makanan Kuliner (Slide PowerPoint Seminar)*. [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/LIGA\\_SURYADANA/Perkembangan\\_industri\\_kuliner.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/LIGA_SURYADANA/Perkembangan_industri_kuliner.pdf)
- Syafi'I, M., Suwandono, D. (2015). Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep Community Based Tourism (CBT) Di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. *Ruang*, 1(2):51-60.

Weed, M. (2008). *Sport and Tourism A Reader*. Routledge.

Yonk, Wall, G., Long. (2010). *Balinese Homestay: an indigenous response to tourism opportunities*. International Thomson Business Press.